

**Judul** : Ekspor sumber daya alam "satu pintu" lewat BUMN, tantangannya apa...?  
**Tanggal** : Jumat, 22 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Ekspor Sumber Daya Alam "Satu Pintu" Lewat BUMN, Tantangannya Apa..?

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Kebijakan ini bertujuan mengatur ekspor komoditas SDA Indonesia agar memberi dampak lebih besar terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo menyebut penerbitan PP

tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.

Seluruh penjualan ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi diwajibkan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk Pemerintah sebagai penjalannya harus dilakukan

melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pengekspor tunggal," ucapnya.

Menurut Prabowo, kebijakan ini akan mempermudah pengawasan dan pemantauan ekspor SDA Indonesia. Hasil penjualan ekspor nantinya akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha sebagai bentuk fasilitas pemasaran (*marketing facility*).

Anggota DPR Fraksi Golkar, Firmansyah Soebagyo, menilai kebijakan "satu pintu ekspor SDA lewat BUMN" berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global. Namun, ia mengingatkan adanya risiko, apabila kebijakan tersebut tidak dikelola secara profesional dan transparan. Sementara itu, Ketua Umum

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyampaikan keberatan terhadap PP tersebut. Ia berharap Pemerintah melakukan evaluasi, apabila pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha. Berikut petikan wawancara Eddy Martono dan Firmansyah Soebagyo terkait PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA satu pintu di bawah ini.

**EDDY MARTONO**, Ketua Umum GAPKI

### Para Eksportir Punya Pasar Yang Sudah Dibangun Lama



“ Para eksportir selama ini sudah memiliki pasar masing-masing yang dibangun cukup lama. Jangan sampai dengan sistem baru ini justru pasar-pasar tersebut hilang karena pengelolannya tidak berjalan dengan baik atau kurang fleksibel.

Kemarin, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR menyampaikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas tertentu seperti batu bara dan sawit. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kebijakan tersebut?

Begitu, tidak semua eksportir sawit merupakan perusahaan perkebunan besar yang juga memiliki industri hilir. Banyak juga perusahaan trading atau trader yang melayani pasar-pasar tertentu dengan volume yang tidak terlalu besar.

Maksudnya seperti apa? Jadi begini, para importir di luar negeri biasanya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka

meminta spesifikasi dan komposisi produk tertentu sesuai kebutuhan industrinya.

Bahkan, industri yang sama pun belum tentu memiliki pesanan yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah sistem ekspor satu pintu ini nantinya bisa melayani kebutuhan yang sangat spesifik seperti itu?

Apa dampak yang bisa timbul jika kebijakan ini diterapkan?

Para eksportir selama ini sudah memiliki pasar masing-masing yang dibangun cukup lama. Jangan sampai dengan sistem baru ini justru pasar-pasar tersebut hilang karena pengelolannya tidak berjalan dengan baik atau kurang fleksibel.

Pemerintah sudah mengeluarkan PP terkait kebijakan tersebut. Bagaimana sikap GAPKI?

Kalau PP sudah ditandatangani tentu harus dijalankan. Namun, kami meminta agar dalam implementasinya Pemerintah terus melakukan evaluasi secara berkala.

Lalu bagaimana dampaknya bagi pengusaha, jika kebijakan ini tetap diberlakukan?

Kalau dalam pelaksanaannya ternyata berdampak kurang baik terhadap industri sawit nasional, maka menurut kami PP tersebut sebaiknya diperbaiki agar tidak merugikan pelaku usaha maupun pasar ekspor Indonesia. ■ REN

**FIRMAN SOEBAGYO**, Anggota Komisi IV DPR

### Negara Punya Kendali Terhadap Harga-Volume



“ Kalau dikelola dengan baik, negara bisa mendapat manfaat besar dari sisi hilirisasi dan penerimaan negara. Namun, kalau salah eksekusi, justru bisa mematikan investasi dan membuat buyer global beralih ke negara lain.

Apa pendapat Anda mengenai kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan PP ekspor satu pintu?

Saya kira tujuannya agar negara memiliki kendali lebih besar terhadap harga, volume ekspor, hingga percepatan hilirisasi industri.

Kalau seluruh volume ekspor dikonsolidasikan lewat satu pintu, negara punya daya tawar yang jauh lebih kuat terhadap *buyer* internasional. Ini bisa membuat Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penjual bahan mentah yang mengikuti harga pasar global.

Selain itu, apa manfaatnya?

Mekanismenya satu pintu dinilai dapat meningkatkan transparansi penerimaan

negara. Pengawasan terhadap royalti, pajak ekspor, hingga praktik *under invoicing* disebut akan lebih mudah dilakukan melalui sistem terintegrasi.

Dengan begitu, potensi kenaikan penerimaan pajak dan PNB bisa signifikan karena seluruh transaksi tercatat dan terpantau secara *real time*.

Apakah ada catatan dari kebijakan tersebut?

Memang ada sejumlah tantangan besar yang harus diantisipasi Pemerintah.

Apa saja?

Salah satunya adalah potensi birokrasi dan inefisiensi di tubuh BUMN. Risikonya, BUMN justru menjadi makelar negara yang lambat dan tidak

responsif terhadap dinamika pasar. Kalau ini terjadi, produsen kecil bisa dirugikan.

Apakah ada lagi tantangannya?

Ada potensi matinya kompetisi usaha karena perusahaan swasta yang selama ini memiliki jaringan ekspor dan kontrak langsung dengan pembeli luar negeri bisa kehilangan pasar.

Jika demikian, apa yang harus dilakukan Pemerintah?

Pemerintah harus memastikan tata kelola yang profesional dan transparan. Pengawasan dari DPR, BPK, hingga KPK juga harus diperkuat agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru. ■ REN